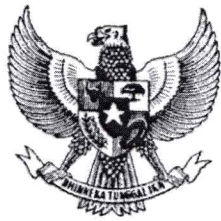


Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2026



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci KM. 09, Bangil, Pasuruan
Email : setdakab@pasuruankab.go.id



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/690/HK/013/2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dalam perencanaan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka pendek tahun 2026 untuk penguatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026.
- KEDUA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i. Dinas Ketenagakerjaan;
- j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Inspektorat Daerah;
- bb. Kecamatan Bangil;
- cc. Kecamatan Beji;
- dd. Kecamatan Gempol;
- ee. Kecamatan Gondang Wetan;
- ff. Kecamatan Grati;
- gg. Kecamatan Kejayan;
- hh. Kecamatan Kraton;
- ii. Kecamatan Lekok;
- jj. Kecamatan Lumbang;
- kk. Kecamatan Nguling;
- ll. Kecamatan Pandaan;
- mm. Kecamatan Pasrepan;
- nn. Kecamatan Pohjentrek;
- oo. Kecamatan Prigen;
- pp. Kecamatan Purwodadi;
- qq. Kecamatan Purwosari;
- rr. Kecamatan Puspo;
- ss. Kecamatan Rejoso;
- tt. Kecamatan Rembang;
- uu. Kecamatan Sukorejo;
- vv. Kecamatan Tosari;
- ww. Kecamatan Tukur;
- xx. Kecamatan Winongan;
- yy. Kecamatan Wonorejo; dan
- zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- KETIGA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 - 8 - 2026

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan
Keuangan dan Aset
Daerah;
3. Arsip.

u. SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk menyesuaikan perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah melalui tahap penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
24. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketuga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau;
26. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun

2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2045;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 dengan memperhatikan dan menyesuaikan adanya perubahan dan perkembangan

keadaan dengan tetap berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tribulan II

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini diantaranya adalah :

1. Sebagai bahan penyusunan KUPA-PPAS Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
2. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah tahun 2026;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :

- 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Sekretariat Daerah serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.
- 1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja.

- 1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menguraikan isu-isu aktual strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP.

- 4.1 Kesimpulan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026. Pada tahun 2026 anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp. 67.611.398.588,-. Anggaran tersebut untuk mendanai pelaksanaan 3 program dan 19 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan pada 8 Bagian yang direncanakan dalam Renja 2026. Dari jumlah anggaran tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tribulan II (Data LRA Per- 13 Mei 2026) adalah sebesar Rp. 14.188.443.472,- atau sebesar 34% dari target selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan renja sampai dengan triwulan ke II ini sebagian sudah terlaksana sesuai dengan target dan jadwal yang direncanakan. Diharapkan melalui Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui penajaman program kegiatan serta anggaran.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sampai Tribulan II yang telah dilaksanakan, di peroleh data program dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini. Capaian yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan selama tribulan II Tahun 2026 dan perkiraan target sampai dengan akhir Tahun 2026 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah.

Dalam tahun 2026 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Indikator tujuan :

1. Nilai LPPD
2. Tingkat Inflasi

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Daerah, dengan indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Capaian target terhadap tujuan Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya hasil pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi 2 (dua) indikator kinerja dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Nilai LPPD

Pada indikator Nilai LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan mempunyai target berupa nilai sebesar 3,26 (sedang) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 dan laporan LPPD Kabupaten Pasuruan telah dikirimkan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil yang dapat disampaikan sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 100.2.7-739 Tahun 2026 Tanggal 16 April 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan merasia Nilai LPPD 3.1595 (Sedang). Target Nilai LPPD pada Tahun 2026 belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses di Kementerian Nilai LPPD terdiri dari kategori urusan sebagai berikut :

- Kategori Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar terdiri dari urusan pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.
- Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar terdiri dari Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
- Urusan Pilihan terdiri dari Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan dan Transparansi dan Partisipasi Publik.

2. Tingkat Inflasi

Berdasarkan data BPS dapat dilihat bahwa indikator kinerja Tingkat Inflasi pada Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa tingkat inflasi rata – rata 1% – 3% dengan indikator kinerja tingkat inflasi belum dapat dibandingkan secara.Tingkat inflasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 tercatat terkendali. Menurut laporan inflasi selama 24 minggu mencatat komoditas penyumbang inflasi seperti cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, beras dan telur ayam ras. Selain itu inflasi tahunan tercatat sebesar 2,92%. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai program dan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga tetap terkendali.

Untuk Target Tingkat Inflasi Tahun 2026 akan direalisasi pada Triwulan IV Tahun 2026.

Sasaran Strategis Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 mempunyai 2 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja.

Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 akan disampaikan pada Triwulan III sehingga target kinerja dari Sekretaris Daerah dapat terrealisasi pada Triwulan III Tahun 2026.

Kriteria SAKIP yang dipantau terdiri dari 4 komponen antara lain :

- Perencanaan kinerja dengan bobot nilai 80;
- Pengukuran Kinerja dengan bobot 30;
- Pelaporan Kinerja dengan bobot 15; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25.

Komponen Pelaporan yang menjadi salah satu tujuan indikator kinerja Sekretaris Daerah.

2. Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan yang memiliki fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Sekretariat daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Sekretariat daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

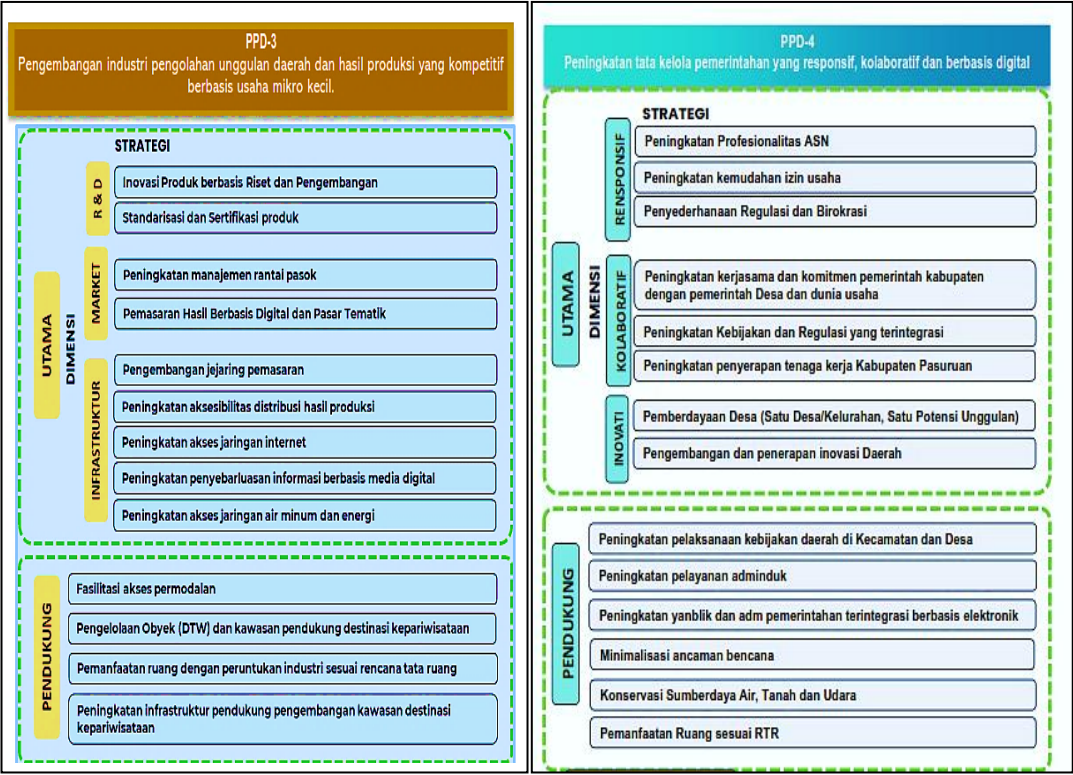
Pada Triwulan I Tahun 2026 dapat disampaikan bahwa hasil penilaian SAKIP akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026. Pada Triwulan I telah dilakukan permintaan data kelengkapan SAKIP 2026 dan dilakukan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Pasuruan.

Sumber data : Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tribulan I Tahun 2026

2.2 Isu-isu Penting/Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Bila dikaitkan dengan prioritas Pembangunan tahun 2026 dan proyek strategis yang akan dibangun dan dikembangkan tahun 2026, Sekretariat Daerah masuk dalam prioritas pembangunan daerah 3 (PPD 3) yaitu Pengembangan Industri Pengolahan Unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang Kompetitif dan 4 (PPD 4) yaitu Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan yang Responsif, Kolaboratif dan Berbasis Digital sebagaimana berikut ini meliputi:



Keterangan :

1. Dalam PPD 3 : Pengembangan industri Pengolahan Unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang Kompetitif → melalui Infrastruktur dengan strategi peningkatan akses jaringan air minum dan energi, Sekretariat Daerah → diampu oleh Bagian Perekonomian.
2. Dalam PPD 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Kolaboratif dan Berbasis Digital → Kolaboratif →Sekretariat Daerah melalui strategi peningkatan kebijakan dan regulasi yang terintegrasi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2029 adalah ” **Meningkatnya Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah**”.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2026

No	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan PD : Meningkatnya Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah	IKU					

No	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IKU / SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator IKU :						
1.	Nilai LPPD	IKU	-	3,1595 (sedang)	3,26 (sedang)	3,26 (sedang)	
2.	Tingkat Inflasi	IKU	Persen	3,03%	3,50%	3,50%	
	Sasaran PD :						
1.	Meningkatnya kualitas pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	IKU					
	Indikator :						
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	IKU	-	12,08	12,50	12,50	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	IKU					
	Nilai SAKIP Setda	IKU	-	83,35	83,35	83,35	
	Indikator SPM/IKK						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	IKK	Persen	0%	0%	0%	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	IKK	Persen	99,36%	98,236%	98,236%	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	IKK	Persen	24,64%	26,00%	26,00%	
4	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	IKK	Persen	21,08%	41,00%	41,00%	

No	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator :						
1.	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	IKK	Poin	40	40	40	
2.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	IKK	Persen	27,98	27,25	27,25	
3.	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	IKK	Poin	17,56	18,29	18,29	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 disertai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan pendukung prioritas pembangunan sebagaimana Tabel 3.2 berikut, dalam tabel 3.3 juga disajikan data awal program/kegiatan/sub kegiatan maupun perubahan baik target maupun anggaran pada tahun 2026:

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2026

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
IKU PD 1 : Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
Target : 13,50

Tabel 2.1 Tabel Evaluasi Hasil Renja Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)							
							I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	13,50				12,50																	
	Sasaran Program 1: Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100%	12.797.015.395	100%	768.407.207.828	100%	16.270.986.587	28%	735.891.478	11%	5.262.152.798				39%	5.998.044.276	39%	37%	139%	774.405.252.104	139%	6051%	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi pemerintahan	1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	124.572.505	100%	749.042.472	100%	438.501.150	30%	67.818.543	0%	99.096.464				30%	166.915.007	30%	38%	130%	915.957.479	130%	735%	
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	20 dok	58.923.414	2 dok	263.642.661	4 dok	112.700.000	2	22.748.150	-	27.356.450				2	50.104.600	50%	44%	4	313.747.261	20%	532%	
	Terlaksananya Pengelolaan Kewilayahan	2 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25 dok	45.814.534	5 dok	206.829.795	5 dok	166.086.150	1	39.941.899	1	11.423.583				2	51.365.482	40%	31%	7	258.195.277	28%	564%	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	25 dok	19.834.557	1 dok	278.570.016	5 dok	159.715.000	1	5.128.494	1	60.316.431				2	65.444.925	40%	41%	3	344.014.941	12%	1734%	
	Terlaksananya fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	2 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	30.506.290	100%	152.196.856	100%	101.425.000	25%	20.116.000	0%	34.326.509				25%	54.442.509	25%	54%	125%	206.639.365	125%	677%	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dok	21.447.059	4 dok	121.257.518	4 dok	87.150.000	1	19.766.000	1	28.990.509				2	48.756.509	50%	56%	6	170.014.027	30%	793%	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	20 dok	3.126.363	1 dok	7.350.000	4 dok	4.050.000	1	200.000	-	2.819.000				1	3.019.000	25%	75%	2	10.369.000	10%	332%	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	25 lap	5.932.868	5 lap	23.589.338	5 lap	10.225.000	2	150.000	1	2.517.000				3	2.667.000	60%	26%	8	26.256.338	32%	443%	
	Meningkatnya hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan kesra	3 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	100%	12.641.936.600	100%	767.505.968.500	100%	14.737.371.651	27%	507.220.000	18%	4.898.828.847				44%	5.406.048.847	44%	37%	144%	772.912.017.347			
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50 dok	7.335.289.719	10 dok	763.941.495.500	10 dok	9.856.498.881	3%	499.785.000	2	4.430.444.897				203%	4.930.229.897	20%	50%	1203%	768.871.725.397	24%	10482%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)														
										I		II		III		IV																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20	dok	5.141.558.385		4	dok	3.350.074.500		4	dok	4.423.235.620		1		1		313.006.450		2		315.481.450		50%	7%	6		3.665.555.950		30%	71%					
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60	dok	165.088.496		12	dok	214.398.500		12	dok	457.637.150		3		3		155.377.500		6		160.337.500		50%	35%	18		374.736.000		30%	227%					
	Sasaran Program 2 : Meningkatkan Kualitas Penyusunan Produk Hukum	1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	96,64		195.116.443		96,46		1.032.788.434		95,58		993.688.786				0		370.637.913		0%		37%		96		1.403.426.347		100%		719%						
	Meningkatnya hasil fasilitasi penyusunan produk hukum	4 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase hasil fasilitasi penyusunan produk hukum yang ditindaklanjuti	100%		195.116.443		93%		1.032.788.434		100%		993.688.786		29%		140.736.935		27%		229.900.978		56%		370.637.913		56%		37%		149%		1.403.426.347		149%		719%
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4.000	produk hukum	65.038.842		800	dok	388.422.836		800	produk hukum	337.666.800		250		39.667.375		225		54.533.011		475		94.200.386		59%		28%		1275		482.623.222		32%	742%	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	150	kasus hukum	65.038.842		4	kasus	399.173.800		20	kasus	352.547.700		5		101.069.560		5		143.724.500		10		244.794.060		50%		69%		14		643.967.860		9%	990%	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	3 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4.000	produk hukum	65.038.759		800	dok	245.191.798		800	produk hukum	303.474.286		250		-		225		31.643.467		475		31.643.467		59%		10%		1275		276.835.265		32%	426%	
	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.375.910.238				5.972.657.154		1		2.487.333.900				272.161.164				650.614.302		0%		922.775.466				37%		0		6.895.432.620				
			2.1 'ROA BUMD	8,35			6,49				7,05		-										0%		-		0%		#DIV/0!	649%		-		78%		#DIV/0!		
			2.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan	85,08			85,54				84,08		-										0%		-		0%		#DIV/0!	8554%		-		101%		#DIV/0!		
			2.3 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Dievaluasi	100%			100%				100%		-	18%			20%						38%		-		38%		#DIV/0!		1		-		138%		#DIV/0!	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)					
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%				14 = 6+12				15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan perekonomian	1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	186.490.519	100%	2.986.328.577	100%	408.168.320	31%	55.633.801	25%	184.577.024					56%	240.210.825	56%	59%	2	3.226.539.402	156%	1730%						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50 dok	47.118.056	20 dok	112.961.450	10 dok	210.619.780	3	10.378.726	2	158.952.000					5	169.330.726	50%	80%	25	282.292.176	50%	599%						
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	50	22.682.862	16 dok	31.309.794	10 lap	23.883.420	2	842.800	3	2.289.600					5	3.132.400	50%	13%	2100%	34.442.194	42%	152%						
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan	3 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	60 dok	95.946.603	29 dok	329.102.333	12 dok	149.615.670	5	42.767.275	2	23.335.424					7	66.102.699	58%	44%	36	395.205.032	60%	412%						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	15 dok	20.742.998	0 dok	2.512.955.000	3 dok	24.049.450	1	1.645.000	1	-					2	1.645.000	67%	7%	2	2.514.600.000	13%	12123%						
	Meningkatnya hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam	2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%	615.295.152	100%	623.031.056	100%	648.110.820	25%	89.141.902	25%	177.731.350					25%	266.873.252	25%	41%		889.904.308								
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	120 dok	600.000.000	40 dok	558.568.986	40 dok	600.000.000	10	87.210.702	10	176.430.950					20	263.641.652	50%	44%	6000%	822.210.638	50%	137%						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	40 dok	15.295.152	12 dok	64.462.070	8 dok	48.110.820	2	1.931.200	2	1.300.400					4	3.231.600	50%	7%	16	67.693.670	40%	443%						
	Meningkatnya hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan adm pembangunan	3 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan adm pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	144.869.749	100%	709.130.960	100%	135.647.760	15%	12.300.336	30%	12.315.600					45%	24.615.936	45%	18%	145%	733.746.896	145%	506%						
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	15 dok	60.682.557	5 dok	489.750.140	5 dok	52.351.380	0	6.995.400	2	1.780.000					2	8.775.400	40%	17%	7	498.525.540	47%	822%						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	85 lap	19.689.180	17 lap	52.915.130	17 lap	16.606.380	4	-	4	6.113.880					800%	6.113.880	47%	37%	25	59.029.010	29%	300%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	3 Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	95 lap	64.498.012	19 dok	166.465.690	19 lap	66.690.000	4	5.304.936	5	4.421.720					9	9.726.656	47%	15%	28	176.192.346	29%	273%
	Meningkatnya hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa	4 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,25	429.254.818	27,98	1.220.348.245	27,25	1.295.407.000	-	115.085.125	-	275.990.328					0%	391.075.453		30%	28	1.611.423.698	99%	375%
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	14.400 dok	418.193.888	7.259 dok	1.001.929.906	2400 dok	1.076.797.000	1032	111.725.125	1.604	259.068.106					2636	370.793.231	110%	34%	9895	1.372.723.137	69%	328%
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25 dok	5.530.465	5 dok	37.569.149	5 dok	102.559.000	1	2.860.000	1	8.644.223					2	11.504.223	40%	11%	7	49.073.372	28%	887%
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1250 orang	5.530.465	603 orang	180.849.190	250 orang	116.051.000	125	500.000	62	8.277.999					187	8.777.999	75%	8%	790	189.627.189	63%	3429%
	Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD		Nilai SAKIP PD	13,50				83,25				80,10													
	Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah dengan baik	3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100% %	28.932.193.106	100%	39.044.767.441	100%	46.961.646.751	27%	7.983.092.693	26%	10.389.967.347					52%	18.373.060.040	52%	39%	152%	57.417.827.481	152%	198%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang selaras	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	95.471.278	100% dok	289.528.677	100%	219.505.052	32%	31.259.396	18%	29.702.240					50%	60.961.636	50%	28%	2	350.490.313	150%	367%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 dok	44.602.573	11 dok	173.306.922	11 dok	142.547.294	3	26.074.472	2	12.781.014					5	38.855.486	45%	27%	16	212.162.408	29%	476%
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 lap	50.868.705	14 lap	116.221.755	11 lap	76.957.758	4	5.184.924	3	16.921.226					7	22.106.150	64%	29%	21	138.327.905	38%	272%
	Tersedianya Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawab kan	100%	17.742.343.888	148%	17.893.785.506	100%	23.302.694.670	57%	4.990.840.041	63%	6.205.393.082					120%	11.196.233.123	120%	48%	268%	29.090.018.629	268%	164%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1140 org/bulan	17.335.440.088	123 orang/bulan	16.843.264.918	228 orang/bulan	22.659.095.000	211	4.877.539.983	222	6.090.971.482					433	10.968.511.465	190%	48%	556	27.811.776.383	49%	160%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1375 dok	406.903.800	542 dok	1.050.520.588	275 dok	643.599.670	61	113.300.058	50	114.421.600					111	227.721.658	40%	35%	653	1.278.242.246	47%	314%
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dengan Baik	3 Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	138.810	33,33%	-	100%	388.500	8%	-	6%	-					0	-	14%	0%	47%	-	47%	0%
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 dok	47.186,00	12 dok	-	12 dok	277.500	3	-	3	-					6	-	50%	0%	18	-	30%	0%
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	45.812,00	0 orang	-	30 orang	55.500	0	-	-	-					0%	-	0%	0%	0%	-	0%	0%
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	45.812,00	0 orang	-	65 orang	55.500	0	-	-	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	1.689.182.422	103%	3.496.180.001	100%	5.502.679.580	23%	779.298.737	14%	1.036.209.905					38%	1.815.508.642	38%	33%	141%	5.311.688.643	141%	314%
	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	8.376.735	4 paket	46.754.500	6 paket	157.063.890	1	3.556.440	-	5.425.680					1	8.982.120	17%	6%	5	55.736.620	33%	665%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	29.321.824	12 paket	265.440.885	9 paket	420.360.219	2	18.110.960	4	32.006.553					600%	50.117.513	67%	12%	1800%	315.558.398	36%	1076%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	17.604.199	4 paket	102.023.779	4 paket	290.424.063	2	22.766.522	1	31.863.558					3	54.630.080	75%	19%	7	156.653.859	35%	890%
	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	14.146.763	7 paket	184.377.105	6 paket	596.186.550	0	-	-	19.660.000					0	19.660.000	0%	3%	7	204.037.105	35%	1442%
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 lap	812.132.229	60 lap	2.139.373.394	60 lap	3.290.061.858	15	621.201.800	15	822.205.145					30	1.443.406.945	50%	44%	90	3.582.780.339	30%	441%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 lap	807.600.672	151 lap	758.210.338	150 lap	748.583.000	45	113.663.015	45	125.048.969					90	238.711.984	60%	32%	241	996.922.322	27%	123%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)		
									I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Terpenuhinya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	2.050.778.805	100%	3.872.234.899	100%	2.362.416.754	10%	37.518.000	12%	376.127.002			22%	413.645.002	22%	18%	122%	4.285.879.901	122%	209%		
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 unit	800.000.000	0% unit	-	- unit	-	0	-	0	-			0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 unit	800.000.000	3 unit	2.545.100.000	- unit	217.116.000	0	-	0	-			0%	-	0%	0%	300%	2.545.100.000	33%	318%		
	Tersedianya Mebel	3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 paket	778.805	41 paket	264.511.203	4 paket	1.106.055.793	0	-	0	-			0	-	0%	0%	41	264.511.203	273%	33964%		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 unit	400.000.000	23 unit	6.230.787.000	8 unit	285.794.888	4	37.518.000	1	49.695.000			5	87.213.000	63%	31%	28	6.318.000.000	165%	1580%		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	50.000.000	21 unit	419.744.996	11 unit	753.450.074	0	-	4	326.432.002			4	326.432.002	36%	43%	25	746.176.998	192%	1492%		
	Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	2.226.468.491	100%	3.364.874.391	100%	4.153.338.424,00	17%	513.977.258	13,83%	592.267.352			31%	1.106.244.610	31%	27%	1	4.471.119.001	131%	201%		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 lap	1.517.459.031	48 lap	1.248.366.683	48 lap	1.201.337.135	12	254.530.098	12	267.160.482			2400%	521.690.580	50%	43%	7200%	1.770.057.263	30%	117%		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 lap	33.195.169	5 lap	96.380.000	10 lap	76.084.236	0	7.200.000	4	6.660.000			4	13.860.000	40%	18%	9	110.240.000	45%	332%		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	425 lap	675.814.291	85 lap	2.020.127.708	135 lap	2.875.917.053	36	252.247.160	33	318.446.870			69	570.694.030	51%	20%	154	2.590.821.738	36%	383%		
	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	2.166.509.112	83%	3.006.871.780	100%	3.116.019.800	18%	229.867.346	22%	463.565.661			40%	693.433.007	40%	22%	123%	3.700.304.787	123%	171%		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	266.400.000	4 unit	345.096.356	4 unit	340.410.000	4	39.768.846	4	56.254.770			8	96.023.616	200%	28%	12	441.119.972	60%	166%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	435 unit	1.615.197.783	87 unit	1.892.548.912	70 unit	1.432.537.200	6	190.098.500	13	358.592.956					19	548.691.456	27%	38%	106	2.441.240.368	24%	151%
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1020 unit	302.360	0 unit	-	5 unit	10.989.000	0	-	-	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	168.353.815	4 unit	172.590.512	4 unit	956.006.200	0	-	-	4.972.614					0%	4.972.614	0%	1%	400%	177.563.126	20%	105%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	150 paket	102.655.659	72 paket	344.710.500	300 unit	271.550.400	0	-	15	24.150.000					15	24.150.000	5%	9%	87	368.860.500	58%	359%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1000 paket	13.599.495	365 paket	251.925.500	4 unit	104.527.000	0	-	1	19.595.321					1	19.595.321	25%	19%	366	271.520.821	37%	1997%
	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kebutuhan operasional KDH / Wakil KDH yang terpenuhi	100%	2.057.774.867	100%	2.199.949.689	100%	2.259.394.380,29	50%	472.451.453,00	75%	490.601.453,00					1	963.052.906	125%	43%	2	3.163.002.595	225%	154%
	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	273.883.817	2 Orang/Bulan	135.545.818	2 Orang/Bulan	183.389.823	2	49.451.453	2	49.451.453	-				400%	98.902.906	200%	54%	600%	234.448.724	60%	86%
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 paket	61.388.157	2 paket	277.800.000	2 paket	266.955.000	0	-	2	18.150.000					2	18.150.000	100%	7%	4	295.950.000	40%	482%
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 orang	30.246.953	2 orang	13.891.240	2 orang	-	-	-	-	-					-	-	0%	#DIV/0!	2	13.891.240	20%	46%
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	1.692.255.940	2 orang/bulan	1.772.712.631	2 orang/bulan	1.809.049.557	2	423.000.000	2	423.000.000					4	846.000.000	200%	47%	6	2.618.712.631	60%	155%
	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Setda	9 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Setda yang terpenuhi	100%	136.530.000	100%	484.643.035	100%	680.652.000	25%	32.358.460	17%	220.424.978					42%	252.783.438	42%	37%	142%	737.426.473	142%	540%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-1/ Th 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun sd Tahun 2026 (%)	
							I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor penghambat keberhasilan kinerja:			1. Adanya kegiatan yang tidak dapat diprediksi												
			2. Penyerapan anggaran berdasarkan target tribulanan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tribulan I												
			3. Keterlambatan pemenuhan data dari Perangkat Daerah												
			4. Adanya pergeseran anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tidak sesuai jadwal yang direncanakan												
			5. Tidak Semua Perangkat Daerah memahami pemenuhan dokumen pelaporan kinerja												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja berikutnya :			1. Penyusunan perencanaan yang tepat												
			2. Akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan serta penyerapan anggaran pada tribulan 2 sesuai target yang direncanakan												
			3. Mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait												
			4. Mengingatkan Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan data secara berkala												
			5. Peningkatan koordinasi antar bagian di lingkup Sekretariat Daerah												
			6. Melakukan optimalisasi tim kerja atau koordinasi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan realisasi kinerja dan belanja baik itu program,kegiatan maupun sub kegiatan												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :			1. Penyusunan perencanaan kinerja yang lebih baik												
			2. Peningkatan komitmen Perangkat Daerah dalam pemenuhan data yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target kinerja												
			3. Perencanaan anggaran yang lebih baik dan detil agar dapat meminimalisasi pergeseran/perubahan anggaran												
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi agar proses pelaksanaan realisasi baik itu kinerja dan anggaran dapat berjalan optimal												
			5. Memberikan pemahaman secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan dokumen pelaporan kinerja												

KETERANGAN PREDIKAT KINERJA	
INTERVAL NILAI	PREDIKAT KINERJA
91%-100%	SANGAT TINGGI
76% - < 91%	TINGGI
66% - < 76%	SEDANG
51% - < 66%	RENDAH
0 - < 51%	SANGAT RENDAH

- Sumber Data :
- Laporan Kinerja Setda Tribulan 2 Tahun 2026
 - LRA Per 30 Juni 2026
 - Laporan Simoneva Tribulan 2 Tahun 2026

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
						AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1.	Pengembangan Industri Pengolahan Unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang Kompetitif (PPD3)	15. Pencarian Sumber Mata Air Baru dan PIPANISASI Air Bersih (PPAB) untuk Mengatasi Kebutuhan Air Bersih di Daerah Kekurangan Air	Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	18.529.640	48.110.820	8 Dokumen	8 Dokumen	4 dokumen	1.931.200	Peningkatan Akses Jaringan Air Minum dan Energi
		21. Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat Pelatihan dan Kreatifitas) dalam Rangka Pengembangan Kreativitas Anak Muda, Optimalisasi Ekonomi Kreatif dan sertifikasi Produk Unggulan/Produk UMKM	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	116.236.570	149.615.670	12 Dokumen	12 Dokumen	7 dokumen	46.531.275	
		22. Usaha Mikro Naik Kelas Berbasis Potensi Unggulan Daerah										
		27. Penataan Kawasan Ibukota Bangil	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.232.000	1.076.797.000	2400 Dokumen	2400 Dokumen	1532 dokumen	370.793.231	Peningkatan Aksesibilitas Distribusi Hasil Produksi
		28. Revitalisasi Pasar Tradisional										
		31. Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Dengan Standart Hotmix/Cor	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi pembangunan	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	71.875.885	52.351.380	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	8.775.400	
					2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	23.852.880	16.606.380	17 dokumen	17 dokumen	8 laporan	6.113.880	
					3. Pengelolaan, Evaluasi dan pelaporan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	76.960.000	66.690.000	19 dokumen	19 dokumen	9 laporan	9.726.656	

TABEL 3.3
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG ASTA CITA DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026

NO	ASTA CITA	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN) TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PN2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ekonomi Syariah	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	27.479.640	23.883.420	10 Laporan	10 Laporan	5 laporan	842.800	
		PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penandaan Fungsi Infrastruktur	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	18.529.640	13.120.920	8 Dokumen	8 Dokumen	4 dokumen	1.931.200	

Tabel 3.5
Tabel Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026

KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
	URUSAN (wajib dasar/wajib nondasar/pilihan)														
	Bidang .Urusan SEKRETARIAT DAERAH														
	UNSUR : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100%	16.769.534.704	100%	16.769.534.704	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100%	16.270.986.587,00		-	(498.548.117)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	365.027.000	100%	365.027.000	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	438.501.150,00	DAU	-	73.474.150	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	102.400.000	4 Dokumen	102.400.000	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	112.700.000,00	DAU	-	10.300.000	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	148.262.000	5 Dokumen	148.262.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	166.086.150,00	DAU	-	17.824.150	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	114.365.000	5 Dokumen	114.365.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	159.715.000,00	DAU	-	45.350.000	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	120.385.000	100%	120.385.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	101.425.000,00	DAU	-	(18.960.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	95.410.000	4 Dokumen	95.410.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	87.150.000,00	DAU	-	(8.260.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	8.225.000	4 Dokumen	8.225.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4 Dokumen	4.050.000,00	DAU	-	(4.175.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 laporan	16.750.000	5 Laporan	16.750.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	10.225.000,00	DAU	-	(6.525.000)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	100%	15.302.073.518	100%	15.302.073.518	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	100%	14.737.371.651,00	DAU	-	(564.701.867)	Efisiensi anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	10.433.222.331	10 Dokumen	10.433.222.331	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	9.856.498.881,00	DAU	-	(576.723.450)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	4.443.851.187	3 Dokumen	4.443.851.187	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	4.423.235.620,00	DAU	-	(20.615.567)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	30 dokumen	425.000.000	30 dokumen	425.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	30 dokumen	457.637.150,00	DAU	-	32.637.150	Efisiensi anggaran
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum			100%	982.049.186	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	100%		DAU	-	(982.049.186)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase hasil fasilitas penyusunan produk hukum yang ditindaklanjuti	93%	982.049.186	100%	982.049.186	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase hasil fasilitas penyusunan produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	993.688.786,00	DAU	-	11.639.600	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800 produk hukum	278.792.700	800 produk hukum	278.792.700	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800 produk hukum	337.666.800,00	DAU	-	58.874.100	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4 kasus	378.792.500	20 kasus	378.792.500	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 kasus	352.547.700,00	DAU	-	(26.244.800)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	800 produk hukum	324.463.986	800 produk hukum	324.463.986	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	800 produk hukum	303.474.286,00	DAU	-	(20.989.700)	Efisiensi anggaran
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.690.368.345		2.690.368.345	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.487.333.900,00	DAU	-	(203.034.445)	Efisiensi anggaran
			2.1 'ROA BUMD	8,35		7,05			2.1 'ROA BUMD	7,05		DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
			2.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan	85,08		84,08			2.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,08		DAU	-	-	
			2.3 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Dievaluasi	100%		100%			2.3 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Dievaluasi	100%		DAU	-	-	
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	375.927.940	100%	375.927.940	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	408.168.320,00	DAU	-	32.240.380	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	207.082.180	10 Dokumen	207.082.180	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	210.619.780,00	DAU	-	3.537.600	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	27.479.640	10 Laporan	27.479.640	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	23.883.420,00	DAU	-	(3.596.220)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	116.236.570	12 Dokumen	116.236.570	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	149.615.670,00	DAU	-	33.379.100	
		Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	3 Dokumen	25.129.550	3 Dokumen	25.129.550	Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	3 Dokumen	24.049.450,00	DAU	-	(1.080.100)	
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%	618.529.640	100%	618.529.640	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%	648.110.820,00	DAU	-	29.581.180	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	120 Dokumen	600.000.000	40 Dokumen	600.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	40 Dokumen	600.000.000,00	DBHCHT	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	40 Dokumen	18.529.640	8 Dokumen	18.529.640	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8 Dokumen	48.110.820,00	DAU	-	29.581.180	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan adm pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	172.688.765	100%	172.688.765	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan adm pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	135.647.760,00	DAU	-	(37.041.005)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	15 dokumen	71.875.885	5 dokumen	71.875.885	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 dokumen	52.351.380,00	DAU	-	(19.524.505)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	85 laporan	23.852.880	17 Laporan	23.852.880	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	17 Laporan	16.606.380,00	DAU	-	(7.246.500)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	95 laporan	76.960.000	19 laporan	76.960.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 laporan	66.690.000,00	DAU	-	(10.270.000)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,25	1.523.222.000	27,25	1.523.222.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	27,25	1.295.407.000,00	DAU	-	(227.815.000)	Efisiensi anggaran
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	14400 dokumen	1.170.232.000	2400 Dokumen	1.170.232.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2400 Dokumen	1.076.797.000,00	DAU	-	(93.435.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25 dok	158.960.000	5 dokumen	158.960.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 dokumen	102.559.000,00	DAU	-	(56.401.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1250 Orang	194.030.000	250 Orang	194.030.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	116.051.000,00	DAU	-	(77.979.000)	Efisiensi anggaran
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	48.151.495.539	100%	48.151.495.539	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	46.961.646.751,19	DAU	-	(1.189.848.788)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	266.873.367	100%	266.873.367	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	219.505.052,00	DAU	-	(47.368.315)	Efisiensi anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 Dokumen	163.731.444	11 Dokumen	163.731.444	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	142.547.294,00	DAU	-	(21.184.150)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan	103.141.923	11 Laporan	103.141.923	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	76.957.758,00	DAU	-	(26.184.165)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawab kan	100%	24.995.468.514	100%	24.995.468.514	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawab kan	100%	23.302.694.669,60	DAU	-	(1.692.773.844)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1140 orang/bulan	24.351.477.949	228 orang/bulan	24.351.477.949	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/bulan	22.659.095.000,00	DAU	-	(1.692.382.949)	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1375 dokumen	643.990.565	275 dokumen	643.990.565	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	275 dokumen	643.599.669,60	DAU	-	(390.895)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	169.183.000	100%	169.183.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	388.500,00	DAU	-	(168.794.500)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	22.422.000	12 Dokumen	22.422.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	277.500,00	DAU	-	(22.144.500)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.555.500	30 Orang	55.555.500	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	55.500,00	DAU	-	(55.500.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	91.205.500	65 Orang	91.205.500	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	55.500,00	DAU	-	(91.150.000)	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	5.338.202.860	100%	5.338.202.860	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	5.502.679.580,00	DAU	-	164.476.720	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	130.174.140	6 Paket	130.174.140	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	157.063.890,00	DAU	-	26.889.750	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	426.118.899	9 Paket	426.118.899	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	420.360.219,00	DAU	-	(5.758.680)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	270.277.563	4 Paket	270.277.563	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	290.424.063,00	DAU	-	20.146.500	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	831.364.470	6 Paket	831.364.470	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	596.186.550,00	DAU	-	(235.177.920)	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	2.737.684.788	60 Laporan	2.737.684.788	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	3.290.061.858,00	DAU	-	552.377.070	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan	942.583.000	180 Laporan	942.583.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	748.583.000,00	DAU	-	(194.000.000)	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	1.038.266.250	100%	1.038.266.250	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	2.362.416.754,30	DAU	-	1.324.150.504	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 unit	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	217.116.000,00	DAU	-	217.116.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	111.000.000	4 paket	111.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	1.106.055.792,60	DAU	-	995.055.793	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	137.473.500	8 unit	137.473.500	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	285.794.888,20	DAU	-	148.321.388	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	789.792.750	11 unit	789.792.750	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	753.450.073,50	DAU	-	(36.342.677)	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	5.649.084.457,98	100%	5.649.084.457,98	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	4.153.338.424,00	DAU	-	(1.495.746.034)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan	1.345.323.859	48 Laporan	1.345.323.859	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.201.337.135,00	DAU	-	(143.986.724)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	2.830.668.136,98	10 Laporan	2.830.668.136,98	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	76.084.236,00	DAU	-	(2.754.583.901)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	425 Laporan	1.473.092.462	135 Laporan	1.473.092.462	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	135 Laporan	2.875.917.053,00	DAU	-	1.402.824.591	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD kondisi baik	100%	3.143.674.800	100%	3.143.674.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	3.116.019.800,00	DAU	-	(27.655.000)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	399.210.000	4 Unit	399.210.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	340.410.000,00	DAU	-	(58.800.000)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	435 Unit	1.960.018.100	70 unit	1.960.018.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 unit	1.432.537.200,00	DAU	-	(527.480.900)	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1020 Unit	732.600	5 unit	732.600	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	10.989.000,00	DAU	-	10.256.400	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	492.118.800	4 unit	492.118.800	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	956.006.200,00	DAU	-	463.887.400	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	150 Unit	250.293.900	300 unit	250.293.900	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	300 unit	271.550.400,00	DAU	-	21.256.500	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1000 Unit	41.301.400	4 unit	41.301.400	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	104.527.000,00	DAU	-	63.225.600	
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kebutuhan operasional KDH / Wakil KDH yang terpenuhi	100%	2.099.864.090,02	100%	2.099.864.090,02	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kebutuhan operasional KDH / Wakil KDH yang terpenuhi	100%	2.259.394.380,29	DAU	-	159.530.290	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/ Bulan	183.388.150	2 Orang/ Bulan	183.388.150	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	183.389.823,10	DAU	-	1.673	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	219.225.000	2 Paket	219.225.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	266.955.000,00	DAU	-	47.730.000	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	4.995.000	2 Orang	4.995.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	DAU	-	(4.995.000)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/ Bulan	1.692.255.940	2 Orang/ Bulan	1.692.255.940	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	1.809.049.557,19	DAU	-	116.793.617	
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Setda yang terpenuhi	100%	680.652.000	100%	680.652.000	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Setda yang terpenuhi	100%	680.652.000,00	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60 Paket	350.316.000	12 Paket	350.316.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	350.316.000,00	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60 Paket	250.416.000	12 Paket	250.416.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	250.416.000,00	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60 Paket	79.920.000	12 Paket	79.920.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	79.920.000,00	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-8	15=13-9	16
		Kegiatan Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	48,43 (sangat tinggi)	112.028.500	48,35 (sangat tinggi)	112.028.500	Kegiatan Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	48,35 (sangat tinggi)	112.028.500,00	DAU	-	-	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 dokumen	33.915.750	4 dokumen	33.915.750	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	33.915.750,00	DAU	-	-	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 laporan	46.663.250	4 laporan	46.663.250	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 laporan	46.663.250,00	DAU	-	-	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	20 dokumen	31.449.500	5 dokumen	31.449.500	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 dokumen	31.449.500,00	DAU	-	-	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	100%	4.658.197.700	100%	4.658.197.700	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	100%	5.252.529.091,00	DAU	-	594.331.391	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120 laporan	3.714.685.000	24 laporan	3.714.685.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	24 laporan	4.627.307.000,00	DAU	-	912.622.000	Efisiensi anggaran
		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120 laporan	322.653.440	24 laporan	322.653.440	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 laporan	322.653.440,00	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Pimpinan	120 laporan	620.859.260	24 laporan	620.859.260	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Pimpinan	24 laporan	302.568.651,00	DAU	-	(318.290.609)	
	TOTAL				67.611.398.588		67.611.398.588				65.719.967.238,19			- 1.891.431.350	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Program Strategis Nasional, Program Asta Cita, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN);
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2026 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2/0294/204/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini untuk mendukung transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efektif, dan efisien, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan *Work From Home* (WFH). Dari aspek keuangan daerah, kebijakan WFH memberikan kontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain melalui pengurangan konsumsi bahan bakar minyak, listrik, air, serta biaya operasional perkantoran. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan ruang fiskal daerah yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pembangunan.
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

3.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang harus diperhatikan :

1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stakeholder;

2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

3.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada kepada Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Mayor) of Pasuruan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI PASURUAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO